

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahl, Roy (2008). The Pillars of Fiscal Decentralization [working paper]. CAF.
- Chandra, Dodi , Syurya Hidayat, Rosmelli. (2017) Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(2). 67
- Irfan Sofi, DJKP. (2020). *Memahami Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/memahami-dana-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa/>, diakses 5 Juli 2021
- Khairunnisa, Normajatun, Fika Fibriyanita. (2019). Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 di Kelurahan Pengembangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Kustianingsih, Nurafni, Muslimin dan Abdul Kahar. (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah, *Jurnal Katalogis*, 6(6), 82
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Pambudi, Nugroho Purbo, Abdul Halim. (2018) Analisis Dampak Penundaan Dana Alokasi Umum Dan Pengurangan Mandiri Dana Alokasi Khusus Pada Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul). *Jurna ABISI*, 6(1). 1
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun Anggaran 2017
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020
- Wahyuni, Endang Sri dan Yuliana Syahfitri (2020). Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai pada Wilayah Bayar Kabupaten
- Wardhana, Retno Andry. (2013). Pengelolaan Dana Perimbangan di Kabupaten Lumajang (Studi di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang).
- Yaqin, Uul Ainun, Titiek Herwanti. (2018). Analisis Permasalahan Pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Pemerintah Daerah, *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol 1(2).
- Yuliani, Irma. (2019). Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan pertumbuhan Ekonomi Daerah, *Uwais Inspirasi Indonesia*. Ponogoro.